

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang professor linguistik, Noa Chomsky di MIT Cambridge, Massachusetts mengulas paradigma terorisme dalam buku yang berjudul “International Terrorism in Real World”. Pada akhir abad ke-18, konsep terorisme sebagai konsep tentang aksi-aksi kekerasan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin ketaatan rakyat. Pelaku terorisme negara atau pemegang kekuasaan mengontrol sistem perasaan dan pikiran rakyatnya, dan dalam perkembangannya paradigma terorisme diubah menjadi “pembalasan oleh individu dan kelompok pada pemegang kekuasaan (negara)”. Bentuk teror juga tidak hanya terlihat secara fisik saja, tetapi dapat juga melalui informasi, ekonomi, psikis, perdagangan. Berdasarkan pendekatan sejarah makna terorisme dapat mengalami perubahan paradigma, awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan pada negara (*crime against state*), lalu berkembang menjadi kejahatan pada kemanusiaan (*crimes against humanity*). Berbagai aksi teror serangan maupun pengeboman diberbagai negara sering terjadi, terutama pasca runtuhnya gedung kembar WTC pada 9 September 2001 (Sudarto, 2012).

Kejahatan pada kemanusiaan (*crimes against humanity*) juga dilakukan oleh salah satu kelompok teroris yang muncul di Somalia, yaitu kelompok Al-Shabaab. Kelompok teroris yang melakukan ekspansi menggunakan kekuatan militer. Al-Shabaab atau “Pemuda” merupakan pemberontak Islam yang berbasis di Somalia, kelompok ini pernah menguasai ibukota Mogadishu dan sebagian besar pedesaan di Somalia, dan kelompok ini terus melakukan pemberontakan dan serangan mematikan terhadap pasukan Barat dan warga sipil di wilayah tersebut sejak tahun 2004. Tujuan keseluruhan Al-Shabaab adalah untuk mendirikan

negara Islam di Somalia, hal lainnya menurut Bronwyn Bruton, seorang ahli al-Shabaab di Dewan Atlantik berkata, “Ide pemersatu al-Shabaab adalah penentangan terhadap pemerintah yang didukung Barat” (Wachira, 2020).

Somalia yang merupakan salah satu negara yang berada di bagian Sub Sahara Afrika, tepatnya Afrika Timur. Berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat (Review, 2021). Negara ini memiliki iklim yang ekstrim yang sebagian besar kering dan panas. Meskipun tetap ada musim hujan, namun sebagian besar negara ini tetap dalam kondisi kekeringan, sehingga tingkat curah hujan yang tinggi masih sangat diperlukan. Sehingga kekeringan mengakibatkan praktik pertanian dan penggembalaan sangat buruk (UNDP, 2012).

Somalia memiliki jumlah populasi sekitar 16 juta penduduk (Meter, 2021) serta memiliki sistem pemerintahan republik federal parlementer dengan presiden sebagai kepala negara memiliki kelompok etnis yang cukup beragam, dengan etnis Somalia (98%), Arab serta Asia (2%), dan bahasa yang digunakan diantaranya Arab dan Somalia yang merupakan bahasa resmi, dan bahasa lain yakni Inggris juga Italia. Agama mayoritas dan utama di Somalia adalah Islam Sunni (Wardani).

Dengan keberagaman yang ada, Somalia justru termasuk dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan dan kelaparan yang tinggi di Afrika bahkan di tingkat dunia. Hal ini bukan hanya dilatarbelakangi oleh kondisi geografis negara yang ekstrim, tetapi banyak faktor lain yang menjadikan negara ini dikenal dengan sebutan *'failed state'* atau negara yang sukar memenuhi kebutuhan penduduknya. selain faktor eksternal, faktor yang banyak berpengaruh ialah faktor internal (Hartati, 2011).

Krisis kemanusiaan Somalia yang seakan tidak ada ujungnya, ini tidak lepas dari berbagai faktor baik faktor

eksternal maupun faktor internal. Namun, sejatinya yang paling berkontribusi besar pada krisis kemanusiaan di negara ini ialah faktor internal. Dinamika konflik yang terjadi di Somalia sangat kompleks baik itu konflik vertikal, maupun konflik horizontal. Somalia merupakan negara yang sangat identik dengan konflik, seperti perang saudara berkelanjutan, negara ini juga dikenal sebagai negara yang penuh akan kekerasan, pembajakan, perebutan sumber daya alam, kekacauan, sengketa perbatasan, kemiskinan, tidak memiliki mata uang nasional, bahkan sempat tidak memiliki pemerintahan yang tidak diakui, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ciri-ciri sebuah negara berdaulat (Meisarani, 2019). Selama lebih dari puluhan tahun Somalia tidak memiliki pemerintahan yang efektif, sehingga penduduk Somalia hidup dengan kekacauan, bertahan hidup tanpa payung hukum (Haninditya, 2018).

Konflik Somalia saat ini merupakan rangkaian dari proses sejarah konflik yang panjang sedari dulu, sejak tahun 1991 kepemimpinan Mohammad Siyad Barre yang mendapatkan posisinya melalui kudeta militer dari presiden sebelumnya. Pemerintahan Siyad Barre membuat kehidupan politik di Somalia semakin memburuk, seperti korupsi dan fokus kekerasan dilayangkan pada warga sipil atas dasar menghilangkan klan lama untuk mengganti klan baru. Cara yang digunakan Siyad Barre adalah mencari teman dari kelompok yang memusuhi dan akan menyerang klan yang menjadi musuhnya, sehingga Siyad Barre memberikan uang dan senjata untuk membantu temannya tersebut untuk menyerang klan musuhnya. Siyad Barre banyak menggunakan kekerasan terhadap warga sipil atas dasar untuk menghilangkan klan tersebut (Haninditya, 2018). Menurut Unit Analisis Pangan & Keamanan, sekitar 919.000 warga Somalia membutuhkan bantuan segera hingga akhir 2005 bahkan sebagai akibat konflik berkepanjangan pasca pemerintahan Siyad Barre (Nations, NEARLY ONE MILLION FACE HUMANITARIAN CRISIS IN SOMALIA, 2005).

Ketidakpuasan dan kekecewaan yang dirasakan, pada akhirnya membentuk kelompok Al-Shabaab untuk mencapai tujuannya agar dapat memperbaiki kondisi Somalia yang terpuruk. Al-Shabaab mulai mengimplementasikan dengan keras akan syariah seperti melarang berbagai jenis hiburan seperti musik dan film, penjualan khat, tanaman narkotika yang sering dikunyah, merokok dan pencukuran jenggot, Hukuman batu dan amputasi juga diberikan pada siapa saja yang menjadi tersangka pencuri dan pezina di wilayah-wilayah yang dikontrolnya, dan melarang segala perilaku yang dianggap tidak islami (Ali, 2008).

Tidak hanya itu, Al-Shabaab juga melakukan penyerangan di luar Somalia, seperti pada tahun 2010 pada pertama kalinya pemboman bunuh diri terkoordinasi di ibukota Uganda, Kampala, menewaskan 74 orang. Ancaman juga dilayangkan oleh juru bicara kelompok al-Shabaab bahwa siapa saja negara yang bersedia mengirim pasukan ke Somalia, mereka akan menghadapi penyerangan dari Al-Shabaab (Felter, 2020).

Krisis kemanusiaan di Somalia terus mengalami peningkatan, menurut *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*, sekitar 5 juta orang membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan di tahun 2016 (Affairs, 2017 *Somalia Humanitarian Needs Overview*, 2016). Hingga pada tahun 2017, sekitar 6,2 juta orang membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan akibat krisis kemanusiaan dan kekeringan, menurut *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (Affairs, 2018 *Somalia Humanitarian Needs Overview*, 2017). Kelompok al-Shabaab tetap menjadi pemicu utama dalam krisis tahun 2017 ini, ditandai dengan penyerangannya pada warga sipil dan objek sipil di Mogadishu, menewaskan lebih dari 500 orang termasuk 25 orang anak dan melukai 300 orang lainnya, ini menjadi peristiwa paling mematikan di Somalia. Peristiwa lainnya di tahun ini diperparah dengan tindakan al-Shabaab melarang dan menyerang sebagian besar organisasi

non-pemerintah dan semua badan PBB yang masuk ke Somalia dari daerah-daerah dibawah kekuasaannya (Masters, 2021).

Somalia tetap menjadi salah satu negara yang paling kompleks dan bertahan lama dengan krisis di dunia. Somalia pada dasarnya tetap masih sangat tinggi akan krisis perlindungan dan kebutuhannya. Ekstremnya iklim, konflik dan ketidakamanan yang berkelanjutan, juga akses layanan penting yang terbatas itu memperburuk situasi masyarakat yang paling rentan, seperti pengungsi dan kelompok marjinal. (Watch H. R., World Report 2020: Somalia, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian yaitu ***“Bagaimana dampak keterlibatan kelompok Al-Shabaab dalam krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 2017?”***

C. Kerangka Teori

Konsep Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan dipahami sebagai sebuah fenomena atau situasi dimana terdapat ancaman yang meluas untuk kehidupan manusia, baik keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan di suatu wilayah (Cooperation, 2017). Menurut *Oxford Dictionary*, kemanusiaan merupakan upaya peduli untuk mempromosikan dan memastikan kesejahteraan manusia, sedangkan krisis yaitu situasi bahaya besar (Dictionary, 2021).

Menurut Humanitarian Coalition, secara umum terdapat tiga jenis penyebab krisis kemanusiaan, yakni :

1. Krisis buatan manusia (termasuk konflik bersenjata, kebakaran dan kecelakaan industri, dan lainnya);
2. Krisis akibat bencana alam: geofisika (tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi), hidrologi (longsor, banjir), klimatologi (kekeringan), biologis (pandemik atau wabah penyakit), meteorologi (badai siklon); dan
3. Krisis akibat keadaan darurat yang kompleks (umumnya kombinasi dari krisis akibat ulah manusia dan bencana alam). Keadaan darurat kompleks ini ditandai dengan :
 - a. kekerasan ekstensif dan hilangnya nyawa,
 - b. populasi yang mengungsi,
 - c. kerusakan yang meluas pada masyarakat dan ekonomi,
 - d. kebutuhan akan bantuan kemanusiaan berskala besar dan beraneka ragam,
 - e. hambatan atau pencegahan bantuan kemanusiaan oleh kendala politik dan militer,
 - f. resiko keamanan yang tinggi bagi pekerja kemanusiaan di beberapa wilayah (Coalition, 2013).

Keadaan darurat yang kompleks timbul dari berbagai konflik, bencana alam, maupun buatan manusia. Bencana alam

seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, kekeringan, kebakaran hutan yang mengakibatkan hilangnya harta benda, cedera fisik dan kematian, tekanan psikologis, perpindahan penduduk, dan lainnya. Begitupun dengan bencana buatan manusia, seperti perang (baik perang saudara, perang antar suku/etnis, perang antar negara dan lainnya), kerusuhan sosial, serangan teroris atau kelompok kepentingan, yang memberi dampak pada terancamnya keamanan dan kesejahteraan fisik, mental dan sosial suatu individu/bangsa, hingga meluas pada kerusakan masyarakat dan ekonomi serta kebutuhan akan bantuan kemanusiaan (Javier, 2021).

Keadaan darurat kompleks juga didefinisikan oleh *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* sebagai krisis kemanusiaan di negara, wilayah atau masyarakat dimana terdapat gangguan atau kerusakan total dan cukup besar yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, yang membutuhkan respon internasional yang melampaui mandat atau kemampuan lembaga tunggal, dan/atau program PBB yang sedang berlangsung serta telah dinilai membutuhkan koordinasi politik dan manajemen yang intensif dan ekstensif (Committee, 2008).

Terdapat setidaknya enam karakteristik dalam krisis aibat keadaan darurat yang kompleks (*Complex Emergencies*): Kekerasan ekstensif dan hilangnya nyawa, kekerasan sendiri didefinisikan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai “penggunaan kekuatan atau kekuasaan fisik dengan sengaja, atau mengancam, terhadap diri sendiri, orang lain atau suatu kelompok yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, perkembangan yang salah atau perampasan (Rutherford, 2007). Populasi yang mengungsi, baik *refugees*, *Internally Displaced Persons (IDP)*, migran, ataupun *Asylum Seeker* (UNESCO, 2021).

Kemudian kerusakan yang meluas pada masyarakat dan ekonomi, kerusakan yang diderita masyarakat secara keseluruhan karena korupsi, penyalahgunaan uang negara, atau perbuatan lainnya yang meliputi harta benda yang dicuri,

pemborosan uang yang dapat dibelanjakan secara alternatif oleh masyarakat, serta dimensi etika atau kerusakan moral, dimensi yang relevan bagi keberadaan atau kesejahteraan manusia seperti kesehatan, infrastruktur, perumahan, maupun lingkungan (Marette, 2014). Lebih lanjut adanya kebutuhan akan bantuan kemanusiaan berskala besar dan beraneka ragam, berkaitan dengan kerusakan yang meluas pada masyarakat, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan dijelaskan oleh *International Labour Organization* (ILO) mengarah pada kebutuhan dasar manusia dalam hal makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan transportasi umum, serta pekerjaan, yang lebih ditekankan dalam keadaan darurat yang kompleks adalah kebutuhan berskala besar (Emmerij, 2010).

Untuk hambatan atau pencegahan bantuan kemanusiaan oleh kendala politik atau militer ialah menjadi sukarnya akses akan bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan dasar populasi yang terdampak konflik yang diakibatkan oleh pihak berkonflik di suatu wilayah. Serta resiko keamanan yang tinggi bagi pekerja kemanusiaan merupakan bentuk terancamnya keselamatan atau keamanan bagi pekerja kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di suatu wilayah, yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadikan pekerja kemanusiaan sebagai sasaran dalam konflik. Hal ini menjadi penting, ditegaskan oleh *Protocol Additional I* pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 pasal 70 dan 71, bahwa semua negara wajib ‘memfasilitasi akses secara cepat tanpa ada hambatan dari semua kiriman bantuan, peralatan, dan personil, bahkan jika bantuan tersebut ditujukan untuk penduduk sipil pihak lawan’, dan ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga sipil (tidak hanya bagi kelompok rentan), dan kiriman bantuan mencakup semua persediaan yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk (tidak hanya untuk kategori barang tertentu). Pihak-pihak yang berkonflik juga memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan positif, melindungi kiriman bantuan dan memfasilitasi distribusi yang cepat, dan memfasilitasi koordinasi internasional yang efektif dari tindakan bantuan. Personil bantuan kemanusiaan juga

harus dihormati, dibantu dan dilindungi sepenuhnya secara praktik dalam menjalankan misi mereka (ICRC, 1977).

Dengan mengacu pada konsep krisis kemanusiaan menurut Humanitarian Coalition dan mengaitkan pada isu yang diangkat dalam skripsi ini, selain bencana kekeringan yang melanda Somalia, Al-Shabaab yang merupakan kelompok ekstremis dengan segala tindakan yang dilakukan dalam meraih berbagai kepentingannya, mewujudkan keadaan darurat yang kompleks di Somalia. Ini mengarah pada krisis kemanusiaan yang mengerikan dan berkelanjutan pada keamanan nasional, dan Al-Shabaab menjadi ancaman bagi keamanan nasional Somalia, tercermin dalam bagaimana Al-Shabaab terus melakukan pemberontakan, ancaman dan serangan mematikan terhadap pasukan Barat, serta bantuan asing yang datang dengan mengorbankan warga sipil. Sehingga dari tindakan yang dilakukannya ini mengakibatkan adanya kekerasan ekstensif dan hilangnya nyawa, populasi yang mengungsi, kerusakan yang meluas pada masyarakat dan ekonomi, hambatan atau pencegahan bantuan kemanusiaan, serta resiko keamanan yang tinggi bagi pekerja kemanusiaan di beberapa wilayah.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, saya berpendapat bahwa, keterlibatan Al-Shabaab memberi dampak pada krisis kemanusiaan di Somalia tahun 2017, ini ditandai dengan adanya kekerasan ekstensif dan hilangnya nyawa serta adanya hambatan atau pencegahan pada bantuan kemanusiaan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterlibatan kelompok Al-Shabaab dalam krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 2017

2. Untuk memperkaya Kajian Hubungan Internasional dengan Masalah Dunia Islam
3. Untuk memperkaya Kajian Hubungan Internasional dengan Politik dan Pemerintahan Afrika

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang menekankan analisis pada proses penyimpulan komparasi juga pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berbentuk deksriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, website, surat kabar, arsip, dokumen dan tulisan lainnya. Disisi lain, saya juga menggunakan teknik penelitian pustakawan (*library research*) dalam teknik pengumpulan data yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, website, surat kabar dan bahan lainnya yang sesuai dengan topik (Syaputra, 2017).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan pada keterlibatan kelompok Al-Shabaab dalam krisis kemanusiaan di Somalia tahun 2017. Karena pada tahun ini, al-Shabaab melakukan pemberontakan yang paling mematikan dalam sejarah di Somalia serta menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, ditambah dengan usahanya membatasi dan menyerang bantuan-bantuan asing yang masuk ke Somalia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup 5 besar yang menjelaskan topik skripsi. Kemudian terdapat pula sub bab-sub bab untuk memperinci penjelasan dari bab-bab besar yang ada. Hubungan antar bab didalam skripsi ini

disusun secara sistematis agar memudahkan para pembaca dalam memahami isi skripsi, yakni :

BAB I Berisi garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian metode penelitian dan sistematika sayaan.

BAB II Saya menjelaskan latar belakang lahir dan hadirnya Al-Shabaab di Somalia, seperti apa itu al-shabab, kapan terbentuknya, dimana basisnya, bagaimana terbentuk maupun keanggotaannya, pendanaan, dan sebagainya.

BAB III Berisi pemaparan dinamika kondisi krisis kemanusiaan di Somalia baik sebelum kehadiran Al-Shabaab hingga setelah kehadiran Al-Shabaab.

BAB IV Saya memaparkan dampak dari keterlibatan kelompok al-Shabaab dalam krisis kemanusiaan di Somalia pada tahun 2017 atas tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok Al-Shabaab.

BAB V Berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dari bab I sampai bab IV sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.